

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 22 Tahun 2015 yang direvisi menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi momentum bagi reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah di Indonesia. Kedua UU tersebut telah merubah akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)).

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan atau kegagalan suatu hal, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya,

berdasarkan identitas pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Thompson et al., (1994) dalam Ngatini (2011).

Menurut Wilkinson et al (2000:14) suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data dan jaringan. Secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah yang besar, kos pemrosesan yang lebih rendah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu instansi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Investasi dibidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota institusi (Wijana, 2007).

Teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan pada suatu instansi. Dengan aplikasi teknologi maka instansi akan mengalami perubahan sistem manajemen dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan juga dengan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan pelayanan, contohnya dengan diterapkannya teknologi informasi pada suatu instansi maka pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut akan semakin cepat dan akurat (Wijana, 2007).

Menurut Bodnar dan William (2006,) pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP tersebut memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan adanya pengendalian intern yang baik, setiap individu dalam organisasi akan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, sistem pengendalian intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik.

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 1992 dalam Reza, 2010). Pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan instansi pemerintah yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seorang pegawai dalam suatu instansi pemerintah untuk berprestasi.

Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin di dalam mempengaruhi para pengikutnya. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala satuan disetiap instansi agar mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan dalam instansi tersebut.

Menurut Robbins (2003) faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik.

Apabila kinerja di instansi pemerintah telah dijalankan dengan maksimal maka hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pemimpin maupun pegawai dalam melaksanakan tugas nya dengan maksimal pula, terutama dibidang kinerja keuangan, baik dalam mengolah data akuntansi secara efisien dan efektif maupun dalam keandalan membuat laporan keuangan sehingga melalui kinerja yang baik dan maksimal maka akan berdampak baik pula terhadap Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun Laporan keuangannya. Dengan demikian Gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan kinerja pegawai dinstansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Oktari (2011) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza (2010) yang menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan dan Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Nugraha (2013) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Friska Manurung, Taufeni Taufik dan Yessi Mutia Basri (2011) yang menyatakan bahwa Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Variabel Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajra (2011) yang menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Oktari (2011) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Kampar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) objek penelitian, yaitu SKPD Kabupaten Rokan Hilir berbeda dengan Oktari yang meneliti kinerja organisasi pada SKPD Kabupaten Kampar (2) menambah variabel Gaya Kepemimpinan, dengan alasan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran, (Robbin, 2006).

Kepemimpinan dalam konteks penelitian ini yang akan dikaji adalah mengenai gaya kepemimpinan (leadership style) yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Oleh sebab itu apabila gaya kepemimpinannya baik maka kinerja yang akan dicapai juga akan baik.

Alasan dipilihnya objek penelitian ini di instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir karena fenomena yang terjadi dilingkungan instansi pemerintah daerah saat ini banyak yang terlibat kasus korupsi. Berikut berita tentang instansi yang melakukan penyelewengan dana anggaran di Kabupaten Rokan Hilir.

Kasus korupsi mantan kepala Bapeda Rohil, Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Rokan Hilir 2006, Wan Amir Firdaus (WAF), sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II tahun 2008-2010. Penyidik menetapkan Wan Amir Firdaus sebagai perakit kasus korupsi pembangunan jembatan senilai Rp 529 milyar dari dana APBD Kabupaten Rokan Hilir tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.Print-02/N.4/Fd.1/04/2015, tanggal 09 April 2015 (<http://www.gatra.com> Jumat, 10 April 2015).

Berdasarkan ketidakkonsistenan dan perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan uraian diatas peneliti tertarik kembali melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Gaya Kepimpinan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hilir”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap terhadap kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hilir?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Rokan Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
- b. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan ini dapat dipenuhi maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan yang lebih banyak tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan guna mendukung otonomi daerah dan guna

mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah.

- c. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan model penelitian yang jauh lebih efektif bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, sampel dan populasi, operasional variabel, sumber, dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN ROHIL**

Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum pemerintah kabupaten Rokan Hilir meliputi sejarah berdirinya pemerintah kabupaten Rokan Hilir, geografis, visi dan misi pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dan struktur pemerintahan kabupaten Rokan Hilir.

##### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.